

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Kemunculan partai-partai politik di Indonesia tidak bisa di lepaskan dari terciptanya suasana kebebasan yang tinggi bagi masyarakat setelah jatuhnya pemerintahan kolonial belanda di Indonesia. Kesempatan seperti itu memberikan ruang dan kebebasan kapada masyarakat Indonesia untuk membentuk organisasi-organisasi termasuk partai politik. Munculnya cikal-bakal dari partai politik sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan. Selain itu, partai-partai politik di Indonesia kemunculannya tidak lepas dari peranan gerakan-gerakan yang menuntut adanya kemerdekaan.

Selain dorongan iklim demokrasi yang diberikan oleh pemerintah kolonial belanda, munculnya partai-partai politik di Indonesia tidak lepas dari karakteristik masyarakat yang majemuk. Cikal-bakal terbentuknya partai politik di Indonesia yaitu lahirnya Budi Utomo yang didalamnya merupakan kaum terpelajar. Perkumpulan ini nantinya membentuk *studie club*, perkumpulan yang terdiri dari perkumpulan sosial, perkumpulan ekonomi, dan organisasi-organisasi pendidikan. Setelah itu, muncullah dua organisasi yang bernama Sarekat Islam dan Indiche Partij. Disusul kemudian tiga organisasi ISDV yang lahir pada tahun 1914 yang didirikan di Semarang.

Selain itu juga lahir beberapa partai politik yang lainnya diantaranya adalah lahirnya, Partai Nasional Indonesia, Partai Indonesia dan lain-lain. Selain itu muncullah organisasi yang bernama Muhammadiyah oleh K.H. Ahmad Dahlan. Akan tetapi Muhammadiyah megikrarkan diri bukan sebagai salah satu partai politik walaupun sebenarnya masih ada hubungannya dengan organisasi politik islam. Tujuan yang paling utama K.H. Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah adalah untuk mengembalikan umat islam kepada sumber Al-Qur'an dan Hadits. Selain itu juga untuk menggugah umat islam agar beramal dan berjuang melalui organisasi ini yaitu Muhammadiyah.

Nasib partai politik lain halnya pada pada masa pendudukan Jepang yang mengalami stagnansi dalam

menjalankan fungsinya. Situasi ini disebabkan karena pemerintah Jepang pada waktu itu tidak memberikan izin kepada partai politik untuk menjalankan aktivitas politik. Pada waktu itu, pemerintah Jepang memfokuskan diri dalam mengeksploitasi rakyat Indonesia dan sumber daya yang dimiliki Indonesia untuk kebutuhan perang bala tentara Jepang. Baru setelah masa kemerdekaan dalam rangka merumuskan dasar-dasar negara terjadi perdebatan yang sengit antara partai-partai politik yang ada. Hal ini disebabkan karena tajamnya perbedaan ideologi dari masing-masing partai politik yang lahir sebelum Indonesia merdeka.

Partai politik bisa tumbuh dan berkembang sejalan dengan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam berpolitik sehingga kehadiran suatu partai politik diharapkan nantinya mampu untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat Indonesia. Sebenarnya, partai politik mempunyai makna dan bagaimana partai politik itu berjalan, maka alangkah baiknya jika kita semua memahami berbagai penegrtian tentang hakiakat partai politik itu sendiri.

Di Indonesia peran partai politik adalah sebagai pilar penopang demokrasi. Dalam pengertian, keberadaan demokrasi tanpa adanya partai politik adalah sebuah kondisi kekuasaan tanpa legitimasi. Karena begitu pentingnya peran partai politik, maka sudah seharusnya jika partai politik diharapkan mampu menjamin demokrasi yang profesional dan efektif dengan menciptakan kondisi partai politik yang sehat dan berkualitas, maka memungkinkan untuk melaksanakan rekrutmen pemimpin atau proses kaderisasi, pendidikan politik dan kontrol sosial yang berkualitas pula.¹

Saat ini sistem politik di Indonesia menjadikan partai politik sebagai salah satu pilar penyangga demokrasi. Kehadiran partai politik dalam suatu negara yang menganut sistem demokrasi tidak bisa dilepaskan dari peran dan fungsinya, tidak hanya kepada konstitusi yang dijalankan tetapi juga kepada bangsa dan negara. Baik buruknya sebuah partai politik dapat berpengaruh pada baik buruknya sebuah bangsa. Hal ini karena jabatan-jabatan dalam sebuah negara nantinya

¹ Herma Yanti, 'Fungsi Partai Politik Dalam Memberikan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat', 3.1 (2018), 97-109.

akan ditempati oleh orang-orang dari kalangan partai politik yang melalui tahap pemilu maupun pilkada.² Dengan adanya partai politik, konflik dan pemufakatan dapat tercapai guna mencerdaskan masyarakat. Konflik yang tercipta tidak sepatasnya dijadikan alasan untuk memecah belah partai, tapi konflik yang timbul dicarikan solusi untuk menciptakan partai yang kuat dan fungsional.

Partai politik merupakan sarana atau tempat bagi masyarakat untuk berkumpul, menyalurkan aspirasi, dan pendapat politik yang memungkinkan untuk membangun negara kearah yang lebih baik lagi. Dalam rangka pelaksanaan sistem negara yang menganut sistem demokrasi untuk dapat mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, diperlukan partai politik yang dijadikan media partisipasi politik masyarakat dalam mengembangkan kehidupan demokrasi untuk menjunjung tinggi kebebasan yang berdaulat. Partai politik merupakan tempat bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta haknya dalam mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan berserikat sebagai bagian dalam rangka mewujudkan kehidupan kebangsaan yang berdaulat.

Sebagaimana fungsi partai politik dalam pasal 11 ayat 1 UU No 2 tahun 2011 tentang partai politik antara lain sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar betul akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan sosial politik menjadi hal yang harus kita lakukan bersama kepada masyarakat luas. Karena pendidikan politik diharapkan untuk mencegah gesekan dalam setiap proses tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Partai politik mempunyai peranan yang penting dalam melaksanakan pendidikan politik, dengan adanya kegiatan tersebut suatu partai politik dapat meningkatkan partisipasi aktif setiap warga negara dalam proses demokrasi.³

Namun, banyak partai politik di Indonesia yang lupa akan fungsi yang sesungguhnya, salah satunya yaitu pendidikan politik. Partai politik belum memperlihatkan hasil yang signifikan bagi peningkatan kesadaran politik masyarakat.

² Yanti.

³ Yanti.

Justru partai politik mendapat kritikan, karena partai politik cenderung memprioritaskan kepentingan partainya sendiri ketimbang pentingnya pengetahuan tentang politik bagi masyarakat. Partai politik yang ada di Indonesia sangat beragam, dan banyak jumlahnya. Pada pemilu tahun 2019 terdapat 16 partai politik nasional, dan 4 partai lokal Aceh. Salah satu partai nasional peserta pemilu tahun 2019 adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP). PPP sangat gigih dalam memperjuangkan aspirasi umat islam dan mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur, sejahtera, dan juga demokratis dalam negara kesatuan republik Indonesia yang berlandaskan pancasila di bawah ridha Allah subhanahu wata'ala.

PPP atau Partai Persatuan Pembangunan sendiri berdiri pada tanggal 5 Januari 1973, sebagai hasil penggabungan dari empat partai Islam yaitu Partai Nahdlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti).⁴ Fungsi ini menjadi simbol kekuatan PPP yang mampu mempersatukan empat partai umat Islam. Partai Persatuan Pembangunan merupakan tempat perjuangan umat Islam dan wahana pembangunan demokrasi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan nilai-nilai Islam yan Rahmatan Lil'Alamin.

Ideologi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah bahwa Islam sebagai syari'at terakhir yang diturunkan Allah SWT kepada umat manusia di bumi adalah bersifat universal. PPP berpendapat bahwa, paham keagamaan yang dianut sebagian besar atau mayoritas umat Islam di Indonesia adalah paham ahlusunnah wal jama'ah (paham keagamaan yang bersandar kepada nabi Muhammad SAW, para sahabat serta salaf as-sholeh). Islam sebagai ideologi dimaksudkan bahwa seluruh sikap, pemikiran, dan kebijakan partai maupun kader-kadernya bersumber dari ajaran agama islam.

Struktur organisasi kepemimpinan PPP sesuai dengan pasal 12 AD ART PPP adalah organisasi tingkat nasional

⁴ Efi Lusmianingsih, "Peran PPP Dalam Melaksanakan Pendidikan Politik Untuk Meningkatkan Partisipasi Aktif Kaum Muda Di Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara," 2013.

dipimpin oleh dewan pusat Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPP PPP, organisasi tingkat provinsi dipimpin oleh Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya disingkat DPW PPP, organisasi tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh Dewan Pimpinan Cabang, selanjutnya disingkat DPC PPP, organisasi tingkat kecamatan dipimpin oleh Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan yang berkedudukan di Ibukota Kecamatan yang kemudian disingkat PAC PPP dan organisasi tingkat desa atau kelurahan atau sebutan lainnya dipimpin oleh Pimpinan Ranting Partai Persatuan Pembangunan.⁵ Sedangkan DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Pati yang diketuai oleh H. Suwito, S.H. berlokasi di Jl. Pati – Tayu Km.2 (Depan Alugoro) Kutoharjo Pati Jawa Tengah 59118.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap salah satu partai islam yang ada di Kabupaten Pati mengenai strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat.

B. Fokus Penelitian

Aapun fokus penelitian yang akan dibahas oleh peneliti dalam penelitian ini adalah membahas bagaimana strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik yang dilakukan oleh salah satu partai islam yaitu Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diperoleh rumusan masalah terkait dengan penulisan yang akan dilakukan oleh penulis yaitu:

1. Bagaimana strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik (studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan kabupaten Pati) ?
2. Apa saja faktor pendukung pendidikan politik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati ?
3. Apa saja faktor penghambat pendidikan politik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati ?

⁵ Lusmianingsih.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik (studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati).
2. Untuk mengetahui faktor pendukung pendidikan politik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati.
3. Untuk mengetahui faktor penghambat pendidikan politik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang terkait maupun yang berminat dalam pembentukan kemandirian santri, yaitu:

1. Segi Teoritis

Penelitian ini secara teoritis diharapkan bisa memberikan kontribusi wacana dan menambah ilmu pengetahuan tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian dalam strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik.

2. Segi Praktis

Penelitian ini memiliki kegunaan praktis sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam sebuah pertimbangan untuk mengambil kebijakan terkait strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik.
- b. Memberikan wacana bagi DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati untuk mengembangkan strategi dalam memberikan pendidikan politik.
- c. Sumber inspirasi bagi yang membutuhkan, terutama untuk yang sedang melakukan penelitian agar mampu mempermudah dan melancarkan analisisnya.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran sekaligus garis-garis dari masing-masing bagian maupun yang saling berhubungan atau bersangkutan. Sehingga nantinya akan diperoleh penelitian

yang sistematis dan ilmiah. Berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi yang akan penulis susun sebagaimana berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : KERANGKA TEORI

Pada bab ini berisi uraian konsep definisi yang berkaitan dengan judul penelitian, yang meliputi pengertian strategi, pendidikan dan partai politik.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang: Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, *Setting* Penelitian, Subyek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pengujian Keabsahan Data dan Teknik Analisis Data.

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

Bab ini berisi tentang latar belakang dan pembahasan tentang strategi partai politik dalam memberikan pendidikan politik oleh DPC Partai Persatuan Pembangunan di kabupaten Pati serta faktor pendukung dan penghambatnya.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari simpulan, saran dan penutup.